

Manajemen Pendidikan Berbasis Komunitas: Peran Kearifan Lokal, Partisipasi Masyarakat, dan Kepemimpinan Sosial dalam Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan di Wilayah Tertinggal

Arifannisa

Program Studi Matematika, STKIP Kusuma Negara, Indonesia

E-mail: arifannisa@stkipkusumanegara.ac.id

Article History:

Received: 10 Agustus 2025

Revised: 27 Agustus 2025

Accepted: 29 Agustus 2025

Keywords: Manajemen Pendidikan Berbasis Komunitas; Kearifan Lokal; Partisipasi Masyarakat; Kepemimpinan Sosial; Pengabdian Masyarakat; Wilayah Tertinggal

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pendidikan berbasis komunitas dengan menekankan pada peran kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan sosial dalam meningkatkan akses serta mutu pendidikan di wilayah tertinggal. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dari artikel ilmiah di Google Scholar dan website kredibel tertentu yang diterbitkan pada periode 1969–2025. Dari 50 artikel yang diperoleh, setelah seleksi ketat digunakan 32 artikel yang paling relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi keterkaitan antara teori, hasil penelitian terdahulu, dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat dijadikan dasar kurikulum dan manajemen pendidikan yang kontekstual, partisipasi masyarakat menjadi penggerak keberlanjutan pendidikan, dan kepemimpinan sosial mampu membangun koordinasi serta motivasi kolektif dalam mendukung pendidikan di daerah tertinggal. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk menambah referensi terkait pengabdian masyarakat, khususnya dalam pengembangan model pendidikan berbasis komunitas yang berakar pada nilai budaya, kolaborasi masyarakat, dan kepemimpinan lokal. Temuan ini juga memiliki implikasi teoritis dalam memperkuat literatur tentang manajemen pendidikan komunitas serta implikasi praktis bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi dalam merancang kebijakan dan program pengabdian yang lebih adaptif dan berkelanjutan di wilayah tertinggal.

PENDAHULUAN

Manajemen pendidikan berbasis komunitas merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan proses

pendidikan di lingkungannya. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal. Menurut Bray (2003), *community-based management of education* memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pemantauan mutu pendidikan sehingga tercipta rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap sekolah. Dalam konteks wilayah tertinggal di Indonesia, manajemen pendidikan berbasis komunitas menjadi sangat relevan mengingat masih banyaknya keterbatasan infrastruktur, tenaga pendidik, serta akses terhadap fasilitas belajar yang memadai. Maka, kajian pustaka terkait konsep ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan strategi yang melibatkan kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan sosial dapat menjadi solusi nyata bagi peningkatan akses serta mutu pendidikan.

Kearifan lokal (*local wisdom*) memiliki peran signifikan dalam mengembangkan manajemen pendidikan berbasis komunitas karena menjadi modal sosial yang melekat di masyarakat. Menurut Geertz (1983), kearifan lokal merupakan nilai, norma, dan praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dan mampu menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pendidikan, kearifan lokal berfungsi sebagai sebagai dasar pembentukan karakter, penguatan identitas budaya, dan pengembangan kurikulum yang lebih kontekstual. Misalnya, di beberapa wilayah pedalaman Indonesia, tradisi gotong royong dan musyawarah dapat dijadikan landasan dalam membangun sekolah, menyediakan fasilitas belajar, bahkan mendukung pembiayaan pendidikan (Seda & Niron, 2022). Proses belajar mengajar akan terasa lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa sekaligus memperkuat keterhubungan antara sekolah dan komunitas dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam manajemen pendidikan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek kunci dalam manajemen pendidikan berbasis komunitas. Menurut teori partisipasi Arnstein (1969), keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai tingkatan, mulai dari sekadar menerima informasi, konsultasi, hingga pengambilan keputusan penuh. Dalam pendidikan di wilayah tertinggal, partisipasi masyarakat sering menjadi penopang utama karena keterbatasan dukungan dari pemerintah. Misalnya, masyarakat dapat berkontribusi dalam penyediaan tenaga pengajar sukarela, perbaikan sarana sekolah, atau mendukung pembiayaan pendidikan melalui skema gotong royong. Penelitian yang dilakukan oleh Hurriyah (2022) menunjukkan bahwa sekolah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki kinerja lebih baik dalam hal kehadiran siswa, keberlanjutan program belajar, serta kualitas pembelajaran. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi instrumen vital dalam menjamin keberlanjutan pendidikan di wilayah tertinggal.

Kepemimpinan sosial juga menjadi faktor inti yang dapat menentukan keberhasilan manajemen pendidikan berbasis komunitas. Menurut Northouse (2013), kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks komunitas lokal, kepemimpinan sosial tidak selalu identik dengan jabatan formal, melainkan dapat muncul dari tokoh masyarakat, pemimpin adat, atau bahkan guru yang memiliki pengaruh kuat di tengah komunitas. Kepemimpinan sosial yang efektif mampu menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung pendidikan, mengoordinasikan sumber daya lokal, serta membangun solidaritas untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Dalam berbagai kasus di daerah tertinggal di Indonesia, peran kepala desa atau tokoh agama seringkali menjadi faktor kunci dalam menginisiasi pendirian sekolah swadaya, menggerakkan orang tua agar menyekolahkan anak-anak mereka, serta menjaga keberlangsungan pendidikan berbasis komunitas (Manasye, 2021; Mayasari, 2018; Subagja, 2020).

Keterpaduan antara kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan sosial menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Model manajemen pendidikan berbasis komunitas menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, di mana sekolah tidak berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Menurut teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner (1979), perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai sistem sosial di sekitarnya, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas. Dengan demikian, pendidikan yang berakar pada nilai lokal, didukung partisipasi aktif masyarakat, serta dipimpin oleh tokoh-tokoh sosial yang berpengaruh akan lebih mudah diterima, dijalankan, dan dikembangkan di wilayah tertinggal. Keterpaduan ini juga memungkinkan terciptanya keberlanjutan karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab kolektif terhadap keberlangsungan pendidikan.

Namun, penerapan manajemen pendidikan berbasis komunitas tidak terlepas dari tantangan. Fullan (2007) dalam teori perubahan pendidikan menekankan bahwa setiap upaya transformasi memerlukan kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang efektif, serta komitmen kolektif dari semua pihak. Di wilayah tertinggal, hambatan yang sering muncul antara lain keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengelola pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta minimnya dukungan kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan lokal. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan antaraktor dalam komunitas dapat menimbulkan konflik yang justru menghambat proses pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi manajemen yang mampu menyeimbangkan antara kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan sosial agar pendidikan berbasis komunitas dapat berjalan dengan efektif.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya keberhasilan penerapan manajemen pendidikan berbasis komunitas di berbagai negara berkembang. Misalnya, program *School-Based Management* (SBM) di Filipina dan Nepal terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemberdayaan komite sekolah dan pelibatan orang tua dalam pengambilan keputusan (Fuente, 2025; Puri & Chhetri, 2024). Di Indonesia, model serupa dapat ditemukan pada program sekolah berbasis masyarakat di daerah pedalaman Papua, di mana masyarakat berperan langsung dalam membangun sekolah, mendanai operasional, hingga menyediakan tenaga pengajar lokal (Alfasisromarakap et al., 2021; Arswimba et al., 2023). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa meskipun berada di wilayah dengan keterbatasan sumber daya, pendidikan tetap dapat berlangsung apabila masyarakat merasa dilibatkan secara penuh. Hal ini memperkuat argumen bahwa manajemen pendidikan berbasis komunitas merupakan strategi yang relevan dan efektif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di wilayah tertinggal.

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka tersebut, jelas bahwa manajemen pendidikan berbasis komunitas memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan di wilayah tertinggal. Kearifan lokal memberikan dasar nilai dan identitas, partisipasi masyarakat menjadi motor penggerak keberlanjutan, sementara kepemimpinan sosial memastikan adanya koordinasi, arah, dan motivasi kolektif. Meski demikian, implementasinya membutuhkan dukungan dari kebijakan pemerintah, penguatan kapasitas masyarakat, serta mekanisme kolaborasi yang berkesinambungan agar tidak berhenti pada inisiatif jangka pendek. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan sosial dalam mendukung manajemen pendidikan berbasis komunitas, sekaligus menilai kontribusinya dalam meningkatkan akses serta mutu pendidikan di wilayah tertinggal.

KAJIAN LITERATUR

Manajemen Pendidikan Berbasis Komunitas

Manajemen pendidikan berbasis komunitas adalah suatu pendekatan pengelolaan pendidikan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan pendidikan (Kahfi, 2022). Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa pendidikan hasil kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan komunitas. Dalam praktiknya, manajemen ini mengandalkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyediaan sumber daya, serta pengawasan mutu pembelajaran sehingga tercipta rasa memiliki (*sense of ownership*) yang tinggi terhadap sekolah. Pendidikan tumbuh dari bawah (*bottom-up*) berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini sangat relevan bagi wilayah tertinggal, di mana keterbatasan sarana, tenaga pendidik, dan dukungan pemerintah dapat diatasi melalui kekuatan komunitas yang solid.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah nilai, norma, tradisi, dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat tertentu dan diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman hidup (Izzah & Budhi, 2024). Dalam konteks pendidikan, kearifan lokal menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, serta pengelolaan sekolah agar lebih kontekstual dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, nilai gotong royong dapat dijadikan dasar kolaborasi dalam membangun sekolah, sementara cerita rakyat dan tradisi lisan dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar yang memperkaya literasi siswa. Kearifan lokal memastikan bahwa pendidikan tidak terlepas dari realitas sosial di mana peserta didik berada. Proses pendidikan menjadi lebih bermakna karena membangun keterhubungan antara warisan budaya dan kebutuhan modern dengan mengintegrasikan kearifan lokal.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam mendukung dan mengembangkan pendidikan, baik dalam bentuk kontribusi tenaga, pikiran, waktu, maupun sumber daya material (Pakniany et al., 2020). Tingkat partisipasi ini dapat beragam, mulai dari sekadar memberikan masukan, hingga ikut mengambil keputusan strategis dalam manajemen sekolah. Dalam wilayah tertinggal, partisipasi masyarakat seringkali menjadi penopang utama karena keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Contohnya, orang tua dan warga lokal dapat menjadi guru sukarela, bergotong royong memperbaiki bangunan sekolah, atau menggalang dana untuk operasional pendidikan. Partisipasi semacam ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi sosial dan generasi mendatang.

Kepemimpinan Sosial

Kepemimpinan sosial merujuk pada peran tokoh masyarakat, pemimpin adat, pemuka agama, maupun figur lokal yang memiliki pengaruh dalam menggerakkan komunitas untuk mendukung pendidikan (Gulo & Sitepu, 2023). Kepemimpinan ini tidak selalu formal, tetapi lebih pada kemampuan seorang individu untuk menginspirasi, mengarahkan, dan membangun solidaritas sosial demi mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pendidikan berbasis komunitas, kepemimpinan sosial berfungsi sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, penggerak partisipasi warga, serta mediator antara kepentingan lokal dan kebijakan eksternal. Keberhasilan pendidikan di wilayah tertinggal seringkali ditentukan oleh adanya pemimpin sosial yang visioner dan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Pengabdian Masyarakat

Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga, maupun organisasi sosial untuk memberdayakan masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun teknologi. Dalam bidang pendidikan, pengabdian masyarakat berfungsi memperkuat kapasitas komunitas lokal dalam mengelola sekolah, mengembangkan kurikulum kontekstual, serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik (Raihan et al., 2025) . Bentuk pengabdian dapat berupa pelatihan guru, pendampingan manajemen sekolah, pengembangan media belajar berbasis teknologi, hingga penelitian kolaboratif dengan komunitas lokal. Peran pengabdian masyarakat sangat dibutuhkan di wilayah tertinggal karena dapat menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan realitas lapangan, sekaligus memperkaya literatur dan praktik pendidikan berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Wilayah Tertinggal

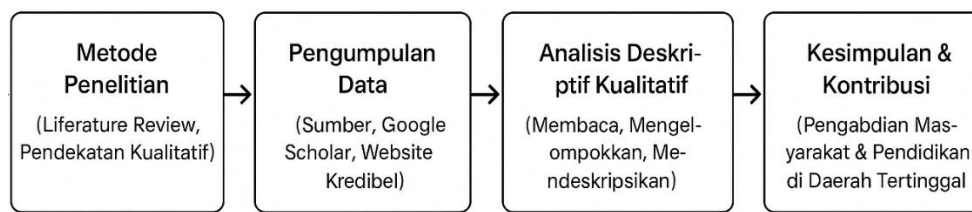
Wilayah tertinggal adalah daerah yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur, akses ekonomi, layanan publik, termasuk pendidikan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, indikator wilayah tertinggal mencakup rendahnya akses pendidikan, layanan kesehatan, ketersediaan sarana transportasi, serta keterisolasian geografis. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya angka partisipasi sekolah, kualitas pembelajaran, serta keberlanjutan pendidikan (Aziza & Srimarchea, 2023) . Maka, pendekatan manajemen pendidikan berbasis komunitas menjadi solusi strategis untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di wilayah tertinggal karena memanfaatkan kekuatan lokal seperti kearifan budaya, solidaritas masyarakat, dan kepemimpinan sosial untuk mengisi kekurangan yang belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif, di mana fokus utamanya adalah mengumpulkan, menganalisis, dan mendeskripsikan berbagai hasil penelitian serta publikasi akademik yang relevan dengan topik “Manajemen Pendidikan Berbasis Komunitas: Peran Kearifan Lokal, Partisipasi Masyarakat, dan Kepemimpinan Sosial dalam Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan di Wilayah Tertinggal.” Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat basis teoretis sekaligus memperluas wawasan ilmiah. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menambah referensi terkait pengabdian masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya literatur mengenai praktik pemberdayaan pendidikan berbasis komunitas yang kontekstual di wilayah tertinggal.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari *Google Scholar* dan *website* kredibel tertentu yang memiliki relevansi akademik maupun institusional, dengan cakupan publikasi antara tahun 1969 hingga 2025. Data awal yang diperoleh sebanyak 50 artikel yang membahas isu terkait manajemen pendidikan berbasis komunitas, kearifan lokal, partisipasi masyarakat, kepemimpinan sosial, serta hubungannya dengan peningkatan akses dan mutu pendidikan. Namun, setelah dilakukan seleksi ketat berdasarkan kriteria inklusi seperti relevansi topik, keterbaruan tahun publikasi, kejelasan metodologi, serta kontribusi terhadap tema pengabdian masyarakat, maka jumlah literatur yang digunakan dalam analisis akhir dipersempit menjadi 32 artikel yang paling representatif.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan cara membaca, mengelompokkan, dan mendeskripsikan temuan-temuan utama dari literatur yang terpilih. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, maupun perbedaan antar penelitian, serta untuk menarik kesimpulan mengenai peran kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan sosial dalam manajemen pendidikan berbasis komunitas. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan sistematis tentang strategi pemberdayaan pendidikan di wilayah tertinggal, sekaligus memperkaya referensi bagi program pengabdian masyarakat yang berfokus pada bidang pendidikan.



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen pendidikan berbasis komunitas dapat dijelaskan melalui perspektif *Ecological Systems Theory* yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner (1979), di mana perkembangan individu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sosial, budaya, dan komunitas yang saling berinteraksi serta memengaruhi arah perkembangan pendidikan. Dalam konteks wilayah tertinggal, pendidikan yang dikelola dengan melibatkan komunitas memungkinkan terciptanya keterhubungan antara mikrosistem (keluarga, sekolah, dan teman sebaya), mesosistem (interaksi antar lembaga seperti sekolah dengan organisasi masyarakat), eksosistem (kebijakan daerah dan struktur sosial), hingga makrosistem (budaya, kearifan lokal, dan nilai sosial yang berlaku). Dengan demikian, pendidikan menjadi ekosistem yang dibentuk oleh berlapis-lapis sistem sosial yang saling terkait. Teori ini menjadi relevan ketika kita melihat bahwa di daerah tertinggal, keberhasilan pendidikan tidak mungkin dicapai hanya dengan pendekatan struktural dari pemerintah pusat, melainkan harus ditopang oleh kekuatan sosial komunitas yang memahami konteks lokal. Misalnya, pemanfaatan kearifan lokal dan pola interaksi sosial masyarakat berfungsi sebagai faktor penguat dalam menjaga keberlanjutan pendidikan. Ketika komunitas diberi ruang untuk menentukan arah pendidikan, mereka merasa sebagai subjek yang memiliki hak penuh dalam membangun generasi penerusnya. Rasa memiliki (*sense of ownership*) inilah yang menjadikan keberlanjutan program lebih terjamin, karena masyarakat melihat pendidikan sebagai bagian dari dirinya, bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar, sehingga resistensi dapat diminimalisir dan dukungan dapat dimaksimalkan.

Kearifan lokal sebagai bagian dari *Cultural Capital Theory* yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu menjadi sangat penting karena mampu menyediakan nilai, norma, simbol, serta praktik sosial yang dapat ditransformasikan menjadi modal pendidikan yang bernilai tinggi (Huang, 2019). Modal budaya ini berupa etos kerja, solidaritas, dan kebiasaan kolektif yang melekat pada kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat Papua, nilai gotong royong, solidaritas keluarga besar, serta tradisi musyawarah menjadi sumber kekuatan untuk membangun fasilitas pendidikan meskipun dengan keterbatasan sarana. Seperti dicatat oleh Katolik News (2023), masyarakat di pedalaman Yahukimo berinisiatif membangun sekolah darurat secara swadaya karena dorongan kolektif untuk memastikan anak-anak tetap bisa belajar. Studi terbaru

oleh Aulia et al. (2024) menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang memanfaatkan kearifan lokal, baik dalam manajemen maupun kurikulum, lebih diterima oleh masyarakat karena tidak dianggap sebagai ancaman terhadap identitas budaya mereka. Pendidikan yang memasukkan cerita rakyat, permainan tradisional, dan bahasa lokal ke dalam kurikulum memperkuat ikatan sosial yang sebelumnya rentan terkikis oleh modernisasi. Maka, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai sistem asing atau dominasi negara yang memaksa masyarakat tunduk, melainkan bagian integral dari kehidupan mereka. Pada titik ini, pendidikan menjadi medium penguatan identitas lokal sekaligus sarana untuk membangun daya saing generasi muda di era global.

Peran partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis komunitas dapat dikaji lebih jauh melalui *Theory of Participatory Development* yang diperkenalkan oleh Arnstein (1969), yang menekankan konsep tangga partisipasi dari sekadar *tokenism* (partisipasi simbolik) hingga *citizen power* (partisipasi dengan kekuasaan nyata). Dalam konteks pendidikan, ketika masyarakat hanya dilibatkan secara formal tanpa kewenangan dalam pengambilan keputusan, maka keberlanjutan program biasanya lemah dan rawan berhenti di tengah jalan. Sebaliknya, ketika masyarakat memiliki kontrol nyata terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, maka program pendidikan lebih berpeluang berhasil. Penelitian oleh Khusniyah et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan pendidikan secara langsung mampu meningkatkan kehadiran siswa dan menekan angka putus sekolah, terutama di daerah tertinggal. Contoh konkret dapat dilihat di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, di mana masyarakat setempat bergotong royong mendirikan sekolah nonformal bagi anak-anak yang terisolasi karena faktor geografis. Seperti dicatat oleh (Nuen 2018), masyarakat menjadi relawan pengajar meskipun dengan fasilitas seadanya. Inisiatif ini terbukti meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar di wilayah tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pendidikan di daerah tertinggal. Lebih jauh lagi, keterlibatan aktif masyarakat menumbuhkan solidaritas, memperkuat jaringan sosial, dan menanamkan rasa tanggung jawab kolektif untuk keberlanjutan pendidikan generasi berikutnya.

Kepemimpinan sosial dalam konteks pendidikan berbasis komunitas dapat dijelaskan dengan *Transformational Leadership Theory* yang dikemukakan oleh Bass (1990), di mana pemimpin yang transformasional memiliki kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan menggerakkan masyarakat agar mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan kolektif, termasuk dalam mendorong kemajuan pendidikan di daerah tertinggal. Teori ini menekankan empat dimensi utama, yaitu *idealized influence* (pengaruh ideal), *inspirational motivation* (motivasi inspiratif), *intellectual stimulation* (stimulasi intelektual), dan *individualized consideration* (perhatian individual). Dalam praktiknya, tokoh masyarakat atau pemimpin adat sering kali menjadi figur sentral yang dihormati sehingga ucapan dan tindakannya dapat memengaruhi pola pikir kolektif warga. Sebagai contoh, penelitian oleh Sainawati & Samodra (2021) di Kalimantan Barat memperlihatkan bahwa tokoh adat berperan signifikan dalam membujuk orang tua agar mengizinkan anak-anak mereka bersekolah, meskipun awalnya mereka lebih memilih anak untuk bekerja membantu keluarga. Transformasi pola pikir ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan sosial mampu menggeser orientasi masyarakat dari kebutuhan jangka pendek menuju investasi jangka panjang melalui pendidikan. Pemimpin sosial berfungsi sebagai agen perubahan yang menyusun strategi lokal, memediasi konflik, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan komunitas. Lebih jauh lagi, kepemimpinan transformasional berbasis adat atau tokoh lokal ini mampu menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan ke dalam kerangka budaya, sehingga masyarakat tidak merasa asing dengan program yang dihadirkan, melainkan melihatnya sebagai bagian dari warisan kolektif yang perlu dipertahankan. Keberadaan pemimpin sosial yang

memiliki karakter transformasional sangat menentukan keberhasilan pendidikan berbasis komunitas di wilayah tertinggal.

Hasil penelitian internasional juga memperkuat relevansi konsep manajemen pendidikan berbasis komunitas yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat. Misalnya, program *School-Based Management* (SBM) di Iran yang dikaji oleh Moradi et al. (2012) menunjukkan bahwa ketika komunitas dilibatkan dalam pengelolaan sekolah, maka terjadi peningkatan kualitas pembelajaran, transparansi dalam pengelolaan dana, serta keberlanjutan program sekolah karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendukungnya. Contoh serupa juga terlihat di Nepal, di mana komite sekolah yang dikelola masyarakat berhasil mempertahankan keberlangsungan pendidikan di daerah terpencil dengan biaya rendah dan sistem gotong royong, seperti dicatat oleh Puri & Chhetri (2024). Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan komunitas merupakan fondasi bagi keberlanjutan pendidikan di wilayah-wilayah sulit akses. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan serupa dapat ditemukan pada inisiatif Sekolah Adat di pedalaman Kalimantan yang dipelopori oleh masyarakat Dayak. Menurut Sape (2023), sekolah adat berfungsi sebagai wadah pelestarian budaya yang mengintegrasikan kearifan lokal Dayak dengan kurikulum pendidikan nasional. Model pendidikan semacam ini memberi ruang bagi anak-anak untuk memperoleh pengetahuan akademis yang dibutuhkan di era modern. Integrasi antara nilai-nilai lokal dengan standar pendidikan nasional menjadikan sekolah adat sebagai contoh konkret bagaimana pendidikan berbasis komunitas mampu menjawab tantangan globalisasi tanpa harus mengorbankan identitas kultural masyarakat setempat.

Meskipun banyak bukti menunjukkan keberhasilan manajemen pendidikan berbasis komunitas, tantangan besar tetap menjadi penghalang utama dalam implementasinya, terutama di wilayah tertinggal. Keterbatasan kapasitas masyarakat dalam mengelola program pendidikan, rendahnya literasi digital, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, serta minimnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah sering kali membuat inisiatif komunitas sulit bertahan. Menurut Fullan (2007), perubahan pendidikan yang berkelanjutan memerlukan mekanisme komunikasi yang efektif, keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, dan kepemimpinan yang visioner dalam mengarahkan proses transformasi. Tanpa adanya sinergi antaraktor, program pendidikan komunitas rawan terhenti di tengah jalan. Hal ini diperkuat oleh studi Muhammad (2020) di daerah 3T Indonesia yang menemukan bahwa kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat menyebabkan banyak program pendidikan berbasis komunitas gagal berlanjut meski awalnya berhasil menarik partisipasi. Namun, tantangan ini dapat diatasi ketika terdapat kebijakan nasional yang mendukung, seperti program Guru Penggerak dan Sekolah Penggerak, yang memberikan pelatihan, pendampingan, serta dukungan kelembagaan untuk menguatkan kapasitas komunitas. Kebijakan ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen berbasis komunitas tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus ditopang oleh sinergi dengan pemerintah agar tercipta keseimbangan antara inisiatif lokal dan regulasi nasional. Dengan demikian, tantangan dalam implementasi manajemen pendidikan berbasis komunitas justru menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi multilevel, di mana masyarakat berfungsi sebagai penggerak utama, sedangkan pemerintah memberikan dukungan struktural yang memastikan keberlanjutan.

Kasus di Kabupaten Asmat, Papua, dapat dijadikan contoh konkret bagaimana kombinasi kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan sosial bekerja secara efektif dalam membangun model pendidikan berbasis komunitas yang berkelanjutan. Di wilayah ini, tokoh gereja bersama masyarakat lokal menginisiasi pendidikan nonformal dengan pendekatan budaya Asmat yang unik, di mana seni ukir kayu, tarian tradisional, dan tradisi lisan dijadikan media

utama untuk memperkenalkan keterampilan membaca, menulis, serta berhitung kepada anak-anak. Pendekatan ini adalah strategi yang memperkuat identitas budaya sehingga anak-anak merasa bahwa sekolah adalah bagian dari kehidupannya, bukan sistem asing yang mengancam tradisi mereka. Penelitian lapangan oleh Ramadhani (2020) menunjukkan bahwa metode ini berhasil meningkatkan minat anak-anak Asmat untuk bersekolah karena pembelajaran terasa dekat dengan aktivitas sehari-hari, seperti mendengar cerita leluhur, mengukir patung kayu, atau menyanyikan lagu tradisional. Selain itu, dukungan masyarakat sangat signifikan, misalnya melalui penyediaan tenaga pengajar sukarela dari kalangan pemuda gereja atau orang dewasa yang memiliki keterampilan dasar literasi, sehingga sekolah tetap dapat berjalan meskipun tanpa dukungan penuh dari pemerintah. Bahkan dalam kondisi terbatas, komunitas mampu mengatur jadwal belajar, menyediakan ruang belajar sederhana di rumah ibadah, serta menjaga keberlangsungan kegiatan secara kolektif. Kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan berbasis komunitas di daerah tertinggal ditentukan oleh sejauh mana program tersebut mengakar pada kearifan lokal, melibatkan partisipasi masyarakat, dan dipimpin oleh figur sosial yang dipercaya. Maka dari itu, pengalaman di Asmat menjadi bukti empiris bahwa pendidikan yang berbasis pada kekuatan komunitas mampu menjadi solusi inovatif untuk menjawab tantangan akses dan mutu pendidikan di daerah terpencil.

Berdasarkan kerangka teori, penelitian terdahulu, dan kasus nyata di berbagai daerah, dapat dinyatakan bahwa manajemen pendidikan berbasis komunitas adalah strategi yang efektif untuk menjawab permasalahan akses sekaligus mutu pendidikan di wilayah tertinggal. Kearifan lokal berperan menyediakan nilai, norma, dan identitas budaya yang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pendidikan, sehingga sekolah tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai motor penggerak yang menyediakan tenaga, fasilitas, bahkan inovasi dalam proses belajar mengajar, sementara kepemimpinan sosial menjadi faktor pendorong perubahan yang mampu menginspirasi masyarakat dan mengarahkan energi kolektif ke tujuan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas lokal agar dapat berperan aktif dalam menciptakan perubahan yang sesuai dengan konteks budaya dan sosialnya. Lebih dari itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pengabdian masyarakat, dengan menegaskan bahwa pendidikan bukan semata tanggung jawab negara atau institusi formal, tetapi merupakan hasil kolaborasi aktif antara komunitas, pemimpin lokal, dan lembaga pendidikan. Temuan ini membuka peluang bagi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, maupun pemerintah daerah untuk merancang program pendidikan berbasis komunitas yang lebih inovatif, adaptif, dan kontekstual dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, manajemen pendidikan berbasis komunitas dapat dijadikan landasan strategis dalam memperkuat model pengabdian masyarakat di bidang pendidikan, terutama di daerah tertinggal yang membutuhkan pendekatan berbasis kearifan lokal dan kolaborasi komunitas sebagai solusi berkelanjutan.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penting Manajemen Pendidikan Berbasis Komunitas

Aspek/Teori	Temuan Utama	Contoh Kasus/Referensi
Ecological Systems Theory (Bronfenbrenner, 1979)	Pendidikan di wilayah tertinggal harus dipandang sebagai ekosistem yang terdiri dari mikrosistem, mesosistem, eksosistem, hingga makrosistem yang saling berinteraksi.	Pemanfaatan kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dan meningkatkan sense of ownership masyarakat.

	Keterlibatan komunitas menjadi faktor penting karena mereka memahami konteks lokal lebih baik daripada pendekatan struktural semata.	
Cultural Capital Theory (Bourdieu, 1986; Huang, 2019)	Kearifan lokal berfungsi sebagai modal budaya yang dapat ditransformasikan menjadi modal pendidikan. Nilai gotong royong, musyawarah, dan identitas budaya membuat pendidikan lebih diterima masyarakat.	Masyarakat Yahukimo, Papua, membangun sekolah darurat secara swadaya; Aulia et al. (2024) menegaskan sekolah berbasis kearifan lokal lebih diterima.
Theory of Participatory Development (Arnstein, 1969)	Partisipasi masyarakat yang nyata (citizen power) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan meningkatkan keberhasilan program. Partisipasi simbolik (tokenism) cenderung tidak berkelanjutan.	Kabupaten Ende, NTT: masyarakat mendirikan sekolah nonformal dan menjadi relawan pengajar → menekan angka putus sekolah (Khusniyah et al., 2023; Nuen, 2018).
Transformational Leadership Theory (Bass, 1990)	Pemimpin sosial/adat berperan sebagai agen perubahan yang menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan masyarakat untuk mendukung pendidikan. Kepemimpinan transformasional memperkuat integrasi nilai pendidikan dengan budaya lokal.	Tokoh adat di Kalimantan Barat membujuk orang tua agar anak tetap sekolah (Sainawati & Samodra, 2021).
Praktik Internasional (SBM, School-Based Management)	Pelibatan komunitas dalam pengelolaan sekolah terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran, transparansi dana, serta keberlanjutan program pendidikan di wilayah sulit akses.	Iran (Moradi, 2012), Nepal (Puri & Chhetri, 2024); Indonesia: Sekolah Adat Dayak (Sape, 2023).
Tantangan Implementasi	Keterbatasan kapasitas masyarakat, rendahnya literasi digital, minimnya sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi dengan pemerintah menyebabkan program komunitas sering terhenti.	Studi Muhammad (2020) di wilayah 3T Indonesia. Dukungan kebijakan nasional seperti Guru Penggerak membantu memperkuat komunitas (Fullan, 2007).
Kasus Lokal (Asmat, Papua)	Pendidikan berbasis seni ukir, tradisi lisan, dan dukungan tokoh gereja berhasil meningkatkan minat belajar anak-anak meski tanpa dukungan penuh pemerintah. Keberhasilan ditopang oleh kearifan lokal, partisipasi, dan kepemimpinan sosial.	Penelitian Ramadhani (2020) tentang pendidikan berbasis budaya Asmat.
Implikasi & Kesimpulan	Manajemen pendidikan berbasis komunitas adalah strategi efektif untuk memperkuat akses dan mutu pendidikan di wilayah tertinggal. Kolaborasi antara kearifan lokal, partisipasi masyarakat, kepemimpinan sosial, dan dukungan kebijakan nasional menjadi kunci keberhasilan.	Relevan untuk pengabdian masyarakat, perguruan tinggi, serta kebijakan pendidikan berkelanjutan berbasis komunitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa manajemen pendidikan berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan pendidikan di wilayah tertinggal. Kearifan

lokal berfungsi sebagai dasar nilai dan identitas yang menghubungkan pendidikan dengan kehidupan masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi motor penggerak keberlanjutan, sementara kepemimpinan sosial berperan penting dalam mengoordinasikan sumber daya dan menginspirasi keterlibatan kolektif. Hasil tinjauan pustaka menunjukkan bahwa ketika ketiga faktor ini dipadukan, akses pendidikan dapat diperluas dan mutu pembelajaran meningkat meskipun dalam kondisi keterbatasan. Artinya, manajemen pendidikan berbasis komunitas merupakan instrumen pemberdayaan yang dapat menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pendidikan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai *community-based education* dengan menambahkan perspektif integratif antara teori ekologi, modal budaya, partisipasi, dan kepemimpinan transformasional. Hal ini memperluas pemahaman bahwa pendidikan di wilayah tertinggal tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial-budaya masyarakat. Secara praktis, penelitian ini memberikan rujukan bagi program pengabdian masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, untuk lebih menekankan pendekatan berbasis komunitas yang mengintegrasikan kearifan lokal, partisipasi aktif, dan kepemimpinan sosial. Bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, hasil ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan agar lebih adaptif dan kontekstual.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode tinjauan pustaka dengan sumber data terbatas pada artikel akademik dan website kredibel periode 1969–2025. Jumlah artikel yang dianalisis setelah seleksi hanya 32, sehingga representasi literatur masih bisa diperluas dengan sumber tambahan. Selain itu, analisis bersifat deskriptif sehingga belum memberikan pengujian empiris yang mendalam terhadap hubungan antar variabel. Kondisi lokal setiap wilayah tertinggal juga sangat beragam, sehingga generalisasi temuan ini tetap perlu dilakukan dengan hati-hati.

Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan kajian empiris lapangan agar dapat memverifikasi sejauh mana peran kearifan lokal, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan sosial berpengaruh langsung terhadap akses dan mutu pendidikan di berbagai wilayah tertinggal. Bagi pemerintah daerah, perlu memperkuat kebijakan yang mendukung inisiatif komunitas melalui insentif, pelatihan manajemen pendidikan, dan penyediaan sarana prasarana. Bagi lembaga perguruan tinggi, hasil ini dapat dijadikan pijakan dalam merancang program pengabdian masyarakat yang lebih kontekstual, misalnya dengan membantu sekolah komunitas mengembangkan kurikulum berbasis kearifan lokal atau melatih tokoh masyarakat sebagai agen kepemimpinan pendidikan. Dengan demikian, pengabdian masyarakat akan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tertinggal.

PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi tambahan referensi yang bermanfaat bagi pembaca dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, khususnya di bidang pendidikan berbasis komunitas di wilayah tertinggal.

DAFTAR REFERENSI

- Alfasisromarakap, A., Ahman, A., Sunaryo, S., Achmad, A., Husen, H., & Astra, I. M. (2021). hambatan dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di kabupaten biak numfor provinsi papua di era otonomi khusus papua. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 141–153. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i1.1870>

-
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Arswimba, B. A., Winarti, E., Aquan, H. M., Sianipar, C. P., & Budiasmoro, I. Y. K. (2023). Facilitating the Involvement of Community Leads in the Development of Culture-Based Education in Mappi District, South Papua Province. *Jurnal Nalar Pendidikan*, 11(2), 94. <https://doi.org/10.26858/jnp.v11i2.53613>
- Aulia, A. N., Rahayu, T. H., Suriansyah, A., & Cinantya, C. (2024). Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal: Menjaga Tradisi dan Membangun Masa Depan Masyarakat Banjarmasin. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(4), 2035–2043. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i4.553>
- Aziza, T. N., & Srimarchea, D. W. (2023). Penanganan Daerah Tertinggal di Indonesia. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 7(1), 1584–1600. <https://doi.org/10.37250/khazanah.v7i1.185>
- Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. *Organizational Dynamics*, 18(3), 19–31. [https://doi.org/10.1016/0090-2616\(90\)90061-S](https://doi.org/10.1016/0090-2616(90)90061-S)
- Bray, D. B. (2003). Mexico’s Community-Managed Forests as a Global Model for Sustainable Landscapes. *Conservation Biology*, 17(3), 672–677.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv26071r6>
- Fuente, J. K. de la. (2025). *The Importance of a School-Based Management System (SBM)*. Teacherph. <https://www.teacherph.com/importance-school-based-management-system-sbm>
- Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change*. Routledge.
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. Basic Books.
- Gulo, Y., & Sitepu, E. (2023). Kepemimpinan Transformasional Tokoh Agama: Kontribusi terhadap Kesetaraan Pendidikan di Daerah Terpencil. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 3(4), 147–153. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i4.703>
- Huang, X. (2019). Understanding Bourdieu - Cultural Capital and Habitus. *Review of European Studies*, 11(3), 45. <https://doi.org/10.5539/res.v11n3p45>
- Hurriyah, N. K. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v2i1.13890>
- Izzah, N., & Budhi, S. (2024). Makna dan Nilai Kearifan Lokal Pada Tradisi Mallasuang Manu’ Masyarakat Mandar di Kabupaten Kotabaru. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 3(1), 87–98. <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i1.196>
- Kahfi, M. A. (2022). Manajemen Berbasis Masyarakat dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(3), 589–616. <https://doi.org/10.14421/njpi.2022.v2i3-10>
- Katolik News. (2023). *SD Katolik Pertama Hadir di Kabupaten Yahukimo, Papua*. Katoliknews.Com. <https://katoliknews.com/2021/07/06/sd-katolik-pertama-hadir-di-kabupaten-yahukimo-papua>
- Khusniyah, T. W. K., Puji Yanti Fauziyah, & Ali Mustadi. (2023). keterlibatan orang tua dan kerjasama sekolah dalam pendidikan siswa sekolah dasar: studi kepustakaan. *PROGRES PENDIDIKAN*, 4(3), 193–199. <https://doi.org/10.29303/prospek.v4i3.447>
- Manasye, Y. (2021). *Warga Desa di NTT Bangun Gedung Sekolah Negeri Secara Swadaya*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/nusantara/433457/warga-desa-di-ntt-bangun-gedung-sekolah-negeri-secara-swadaya>

- Mayasari, Y. (2018). *Bupati Amril Mukminin Meresmikan 2 SD Swadaya Masyarakat Menjadi SD Negeri*. Prokopim. <https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/9096/2018/12/13/bupati-amril-mukminin-meresmikan-2-sd-swadaya-masyarakat-menjadi-sd-negeri>
- Moradi, S., Hussin, S. Bin, & Barzegar, N. (2012). School-Based Management (SBM), Opportunity or Threat (Education systems of Iran). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 69, 2143–2150. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.179>
- Muhammad, H. (2020). *Hambatan Koordinasi dan Sinergi Layanan Pendidikan di 3T*. Republika. <https://republika.co.id/berita/qktq29380/hambatan-koordinasi-dan-sinergi-layanan-pendidikan-di-3t>
- Northouse, P. G. (2013). *Leadership: Theory and Practice*. Sage Publications.
- Nuen, M. A. (2018). *Membangun Pendidikan NTT Secara Partisipatif*. Www.Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/madabanuen/5c10bee8ab12ae75fe3b8ed5/membangun-pendidikan-ntt-secara-partisipatif>
- Pakniany, N. S. L., Imron, A., & Degeng, I. N. S. (2020). Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 5(3), 271. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v5i3.13225>
- Puri, P., & Chhetri, D. (2024). A Systematic Review of the Role of School Management Committee for the School Performance in Nepal. *Education Journal*, 13(3), 97–107. <https://doi.org/10.11648/j.edu.20241303.12>
- Raihan, S., Saprizal, Fitriana, Awayundu Said, & Amir Pada. (2025). PKM Penguatan Kapasitas Guru dalam Implementasi Kurikulum Sekolah Ramah Anak Berbasis Budaya Positif di Lingkungan Belajar. *Kreasi: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 223–234.
- Ramadhani, A. S. (2020). *Contextual Education as an Effort to Eradicate Literacy Inequality in Rural Communities in Papua Province*. Universitas Indonesia.
- Sainawati, S., & Samodra, Y. T. J. (2021). Perjuangan melayani kesempatan mengenyam pendidikan di pelosok Tanjung Lesung, Sintang, Kalimantan Barat. *JPPTK: Jurnal Pendidikan Pembelajaran & Penelitian Tindakan*, 1(2), 109–121. <https://doi.org/10.53813/jpptk.v1i2.25>
- Sape, D. (2023). *Memperkuat Warisan Budaya dan Identitas Dayak Melalui Sekolah Adat Arus Kualan*. Www.Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/dellysape1976/647acd4a4addee35c30d8962/memperkuat-warisan-budaya-dan-identitas-dayak-melalui-sekolah-adat-arus-kualan>
- Seda, F., & Niron, M. D. (2022). wuat wa'i: model gotong-royong masyarakat manggarai dalam pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 25–38. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.1864>
- Subagja, U. (2020). *Nilai Agama dan Peran Tokoh Agama Sangat Penting Bagi Pembangunan Desa*. Jurnas.Com. <https://www.jurnas.com/artikel/77472/Nilai-Agama-dan-Peran-Tokoh-Agama-Sangat-Penting-Bagi-Pembangunan-Desa>